



Strategi Kebijakan Implementasi Pendidikan Berkarakter Pancasila dalam Kurikulum Merdeka Belajar: Sebuah Alternatif *Policy Strategy for Implementing Pancasila Character Education in The Independent Learning Curriculum: An Alternative*

Sri Antiningsih¹; Asep Yudha Wirajaya²; Leny Noviani³

¹ Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar,
Karanganyar, Indonesia

^{2,3} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: antien17@gmail.com; asepyudha.w@gmail.com; lenynoviani@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Policy Strategy
Pancasila Character
Independent
Learning
Curriculum

Pancasila character education needs to be implemented properly in every education unit. However, the limited time in the classroom, teachers, and school infrastructure has resulted in various obstacles. Therefore, there needs to be an innovative alternative solution to integrate Pancasila character education with various other subjects at school. Thus, the implementation strategy can be done through students' daily practices at school. This means that there are still opportunities for teachers, schools, and the Education Office to make the program a success. The methods used are (1) an overview of the implementation of the independent learning curriculum at the primary school level so far as well as capturing the perceptions of the parties involved; (2) document studies and limited interviews to see the various potentials and constraints that exist so far; (2) FGDs with education stakeholders so that several implementation strategies can be formulated that are beneficial for the development of education in Sragen Regency. The results are policy strategies that can be pursued, namely integrating Pancasila character education in their curriculum learning through the daily practices of students at school. In addition, the implementation strategy of Pancasila character education prioritizes aspects: of morals (morals and performance), competence, and literacy. Thus, this policy can form a strong young generation without leaving the value of local wisdom and being able to compete globally.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Strategi Kebijakan
Karakter Pancasila
Kurikulum
Merdeka Belajar

Penyelenggaraan pendidikan karakter Pancasila perlu dilaksanakan dengan baik pada setiap satuan pendidikan. Namun keterbatasan waktu di kelas, guru, dan sarana prasarana sekolah mengakibatkan hal tersebut menemui berbagai kendala. Oleh karena itu, perlu ada alternatif solusi yang inovatif sehingga dapat memadukan pendidikan karakter Pancasila dengan berbagai mata pelajaran lain di sekolah. Dengan demikian, strategi implementasinya dapat dilakukan melalui praktik-praktik keseharian siswa di sekolah. Artinya, masih ada peluang bagi guru, sekolah, dan Dinas Pendidikan untuk menyukseskan program tersebut. Adapun metode yang ditempuh adalah (1) overview terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka belajar pada jenjang Sekolah Dasar selama ini sekaligus memotret persepsi para pihak yang terlibat; (2) studi dokumen dan wawancara terbatas untuk melihat berbagai

potensi dan kendala yang ada selama ini; (2) FGD dengan para stakeholder pendidikan sehingga dapat dirumuskan beberapa strategi implementasi yang bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Sragen. Adapun hasilnya adalah strategi kebijakan yang dapat ditempuh, yakni mengintegrasikan pendidikan karakter Pancasila dalam kurikulum mereka belajar melalui praktik keseharian siswa di sekolah. Selain itu, strategi implementasi pendidikan karakter Pancasila mengedepankan aspek: akhlak (moral dan kinerja), kompetensi, dan literasi. Dengan demikian, kebijakan ini mampu membentuk generasi muda yang tangguh tanpa meninggalkan nilai kearifan lokal dan mampu bersaing pada tataran global.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam segala bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Oleh karena itu, dunia pendidikan perlu beradaptasi dengan cepat untuk dapat menghadapi berbagai perkembangan tersebut. Dengan demikian, dunia pendidikan dapat terus memberikan layanan terbaiknya sehingga mampu menyiapkan generasi emas (Khalid, 2008; Hernowo, 2009; Suherman, 2010; Rohmadi, 2016; Wirajaya, 2022).

Konsep inilah yang lebih sering disebut sebagai revolusi spiritual (Chopra, 2002; Agustian, 2003; Sentanu, 2007; Agus, 2014; Yudha Wirajaya and Sudardi, 2021). Sebuah konsep baru yang harus disikapi dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan sehingga mampu menjadi pelopor berbagai perubahan yang ada dan mungkin terjadi.

Dalam perspektif pendidikan yang bercirikan Pancasila, tentu saja tantangan ini merupakan peluang yang harus didekati secara hati-hati oleh semua pihak. Artinya dengan kurikulum yang ada saat ini, para pendidik dihadapkan pada tantangan untuk mempersiapkan generasi emas yang mampu tampil sebagai pemimpin masa depan bangsa yang berkarakter Pancasila (Hayat (Universitas Islam Malang), 2013; Kolis and Ajhuri, 2019).

Terlebih lagi, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang dimulai tahun 2025 dan Indonesia Emas, yaitu pada tahun 2045. Kedua hal tersebut tentu menjadi momentum yang sangat penting dalam sejarah negeri ini. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang agar kedua momen tersebut dapat ditangkap dan dimanfaatkan sebaik-baiknya (Rahmat, 2010).

Dalam konteks ini pula, perlu strategi kebijakan implementasi pendidikan yang berkarakter Pancasila baik mulai dari tingkat pusat, maupun daerah. Dengan demikian, ada petunjuk arah yang jelas dalam setiap tahapan pencapaiannya sehingga memudahkan semua elemen pemangku kebijakan dunia pendidikan untuk melakukan evaluasi pada masa yang akan datang (Khadijah, 2021; Ramadhan, 2021; Sabiila, 2021; Sihaloho, 2021). Selain itu, daerah juga perlu diberikan peluang untuk memberikan sumbangsih yang nyata bukan dalam arti sebagai “objek penderita” dari pengimplementasian kurikulum, melainkan sebagai subjek yang turut serta memberikan warna dalam pengimplementasian kurikulum tersebut. Salah satu daerah yang cukup aktif memberikan sentuhan inovasi tersebut adalah pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022; Wirajaya, 2022).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen menginisiasi perubahan kurikulum muatan lokal sehingga mampu memberikan nilai tambah baik bagi siswa, sekolah, maupun pemerintah daerah. Melalui perubahan tersebut, pemerintah kabupaten Sragen berani mengalokasikan sebagian APDB (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)-nya dan menjangking CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari beberapa

perusahaan swasta dan BUMD serta BUMN yang ada di wilayah Sragen untuk mendukung dan menyukseskan program itu (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022; Wirajaya, 2022). Dengan demikian, daerah perlu diberikan ruang yang cukup agar pengembangan kurikulum muatan lokal ini juga dapat dilakukan berjalan beriringan dengan pendidikan yang berkarakter Pancasila, seperti: meliputi nilai-nilai agama, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai persatuan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam Pancasila dapat dilakukan secara simultan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal (Sekjen Kemendikbud, 2021).

METODE

Secara umum, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni sebuah metode yang mengutamakan kualitas, validitas, dan reliabilitas data (Moleong, 2005; Miles and Huberman, 2007; Herdiansyah, 2012; Sugiyono, 2016). Dengan demikian, informasi yang didapatkan dapat digunakan dalam mendukung dalam proses analisis dan pengambilan simpulan. Adapun tahapan penelitian tersebut dilakukan sebagai berikut.

- (1) Overview kepada semua stakeholder SDN Pembina di masing-masing kecamatan, terutama yang terkait dengan persepsi dan pendapat tentang implementasi muatan lokal selama ini (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022). Dalam proses ini pula, dilakukan pendataan terhadap berbagai potensi dan kendala selama penerapan muatan lokal;
- (2) Memeriksa dokumen dan wawancara untuk mengidentifikasi berbagai keunggulan regional di Bumi Sukowati. Secara khusus, target dari penelitian dokumen dan wawancara ini dilakukan kepada Bappeda dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen. Tentu saja, dalam proses ini juga melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai subjek penelitiannya. Harapannya, melalui kegiatan ini, berbagai potensi daerah yang ada mulai dapat diidentifikasi dan dipetakan dengan baik. Dengan demikian, potensi-potensi daerah tersebut dapat diusulkan menjadi pelengkap materi pembelajaran muatan lokal (Wirajaya, Yudha Asep, Sudardi, Bani, Istadiyantha, 2021).
- (3) Diskusi terumpun dengan topik potensi unggulan dan kendala implementasi muatan lokal di Kabupaten Sragen. Kegiatan ini melibatkan semua stakeholder pendidikan di Bumi Sukowati, seperti Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan: kepala sekolah SDN Pembina dari tiap-tiap kecamatan dan para pengawas SDN Pembina, Dewan Pendidikan kabupaten Sragen, dan tim peneliti dari Universitas Sebelas Maret. Kegiatan ini penting dilakukan terutama untuk merumuskan potensi keunggulan daerah yang ada di kabupaten Sragen. Tentu saja, potensi keunggulan tersebut tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokalnya (Kebudayaan, 2014). Dengan demikian, hal itu akan sejalan dengan semangat *glocalization*. Artinya, di era globalisasi yang sedemikian pesat kita perlu menguatkan nilai-nilai kearifan lokal sehingga mampu bertahan dalam pusaran kemajuan dan derasnya arus informasi (Wirajaya, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, sekolah-sekolah berlabel IT (Islam Terpadu) mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA semakin banyak. Tidak jarang pula, sekolah-sekolah tersebut menerapkan model *boarding school* atau model asrama yang melekat dengan sistem pembelajaran mereka (Al-Ghiffari, 2022). Pada satu sisi, hal itu merupakan pertanda positif yakni bahwa pihak-pihak swasta sekarang sudah mulai mau peduli dan terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan. Namun, pada sisi yang lain, keberadaan sekolah-sekolah tersebut mulai “mengancam” keberadaan sekolah pada jenjang SD (Wirajaya, 2022). Hal itu terlihat dengan semakin sedikitnya minat orang tua yang mendaftarkan anak-anak mereka ke SD Negeri. Tren yang muncul saat ini justru para orang tua lebih memilih mendaftarkan anak-anak mereka ke

SDIT yang nota bene secara pembiayaan jauh lebih mahal daripada SD Negeri. Akibatnya, cukup banyak SD Negeri yang mengalami kekurangan murid baru pada saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Bahkan, beberapa SD Negeri pun sudah mulai di-*merger* atau istilah keren lainnya *re-grouping* karena kekurangan murid (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022).

Tentu saja, fenomena ini perlu disikapi dengan bijak oleh stakeholder pendidikan setempat. Artinya, perlu dicari akar masalah utamanya sehingga para orang tua atau wali murid tidak lagi berminat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke SD Negeri. Selain alasan gengsi, tentu ada alasan lainnya, seperti mutu, sarana – prasarana, guru atau tenaga pengajar, kurikulum, dan lain sebagainya. Dengan pemetaan secara objektif semacam ini, nantinya akan memberikan beberapa alternatif masukan bagi Dinas Pendidikan demi perbaikan pendidikan di kabupaten Sragen (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022). Berikut ini beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh oleh stakeholder pendidikan di kabupaten Sragen.

1. Pemerintah Kabupaten Sragen

Pertama, pemerintah Kabupaten Sragen yang dalam hal ini langsung dikomandani oleh Ibu Bupati Sragen, yaitu dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati melontarkan keprihatinan yang mendalam terkait: (1) menurunnya minat orang tua menyekolahkan anak-anak mereka ke SD Negeri; dan (2) menurunnya mutu lulusan SD Negeri. Oleh karena itu, kedua permasalahan tersebut yang selalu menjadi “biang kerok” dari banyaknya SD Negeri yang mengali *merger* atau *re-grouping* perlu untuk segera diatasi dengan baik. Terkait dengan data jumlah SD Negeri yang ada di daerah Kabupaten Sragen dapat dilihat melalui tabbel berikut.

Table 1. Jumlah SD di bawah Dinas Pendidikan

Kecamatan	2021/2022	2022/2023
Kalijambe	25	25
Plupuh	30	29
Masaran	45	45
Kedawung	38	38
Sambirejo	28	28
Gondang	32	32
Sambung Macan	31	30
Ngrampal	29	29
Karang Malang	38	38
Sragen	37	38
Sidoharjo	29	27
Tanon	28	28
Gemolong	30	28
Miri	24	22
Sumberlawang	27	27
Mondokan	24	22
Sukodono	24	21
Gesi	16	15
Tangen	29	20
Jenar	18	18

Sumber: Anonim, 2024 (diolah)

Berdasarkan data tersebut, setidaknya diketahui bahwa fenomena menurunnya minat orang tua menyekolahkan anaknya ke SD Negeri masih akan terus terjadi. Apabila

hal tersebut tidak segera dicarikan alternatif solusinya, maka jumlah SD Negeri akan semakin tergerus akibat *merger* atau *re-gouping*. Hal itu penting untuk dilakukan mengingat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah beserta perubahannya (Anonim, 2014b), pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan dasar yang meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk dalam menetapkan kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022).

Pengembangan kurikulum muatan lokal ini diharapkan dapat meningkatkan mutu SD Negeri serta mengembalikan kepercayaan publik, khususnya para orang tua siswa untuk mau menjadi bagian keluarga besar SD Negeri. Output SD Negeri diharapkan nantinya tidak akan kalah dengan SDIT-SDIT yang lain, baik dari aspek kompetensi akademik maupun non akademik. Hal ini sejalan dengan muatan lokal sebagai kegiatan kurikuler yang dapat mengembangkan kompetensi siswa yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah masing-masing (Mulyasa, 2009).

Dalam konteks itu pula, Bupati Sragen menginstruksikan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen untuk segera melakukan pengembangan dokumen kurikulum muatan lokal. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Anonim, 2014a). Selain itu, Bupati Sragen juga menginisiasi terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar. Hal ini dipandang penting sebagai payung hukum bagi implementasi kebijakan yang nantinya akan menggunakan sebagian anggaran APBD.

Tentu saja, hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis atas terbitnya sebuah kebijakan publik yang berkekuatan hukum tetap. Namun, mengingat keterbatasan jumlah anggaran yang mampu dipenuhi oleh APBD, Bupati Sragen juga menggandeng sejumlah perusahaan, baik swasta murni, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan menyalurkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) mereka (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022). Dengan demikian, pada saat implementasi pengembangan kurikulum muatan lokal ini tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dana APBD.

Pada tahap awal implementasinya, ada semacam *pilot project* yang diterapkan terutama bagi SD Negeri Pembina yang ada di masing-masing kecamatan. Harapannya, dengan *pilot project* ini nantinya dapat menjadi semacam percontohan bagi sekolah-sekolah Dasar Negeri yang lain jika memang mereka tertarik untuk ikut mengembangkan.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Selain permasalahan jumlah sekolah yang di-*merger* atau *re-grouping*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen juga menghadapi masalah SDM (Sumber Daya Manusia). Hal itu terlihat dari komposisi guru, yaitu antara guru yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru honorer jumlah sangat tidak berimbang. Berikut ini data jumlah guru SD Negeri di Kabupaten Sragen.

Table 2. Jumlah Guru SD di bawah Dinas Pendidikan

Kecamatan	2021/2022	2022/2023
Kalijambe	204	212
Plupuh	269	254
Masaran	469	468

Kedawung	342	345
Sambirejo	252	246
Gondang	278	277
Sambung Macan	256	246
Ngrampal	244	248
Karang Malang	365	380
Sragen	506	528
Sidoarjo	251	246
Tanon	236	229
Gemolong	341	324
Miri	185	189
Sumberlawang	234	224
Mondokan	199	186
Sukodono	197	188
Gesi	124	118
Tangen	177	177
Jenar	150	145

Sumber: Anonim, 2024 (diolah)

Selain itu, jumlah kepala sekolah definitif pada jenjang Sekolah Dasar juga masih sangat jauh dari angka ideal. Sebagian besar posisi kepala sekolah pada jenjang SD diisi oleh Plt. (Pelaksana Tugas). Hal itu terjadi karena tidak banyak guru PNS yang bersedia menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu, setiap awal tahun ajaran, Dinas Pendidikan mengajukan draf SK (Surat Keputusan) Bupati untuk mengangkat dan menetapkan guru-guru yang diangkat menjadi Plt (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022). Keenganan mereka disebabkan antara lain karena beban pekerjaan administrasinya jauh lebih berat atau lebih banyak dan itu tidak sebanding dengan tunjangan jabatan kepala sekolah yang mereka dapatkan. Akibatnya, mereka lebih memilih tugas hanya sebagai guru saja.

Tatkala para guru tersebut diikutsertakan untuk tes promosi jabatan sebagai calon kepala sekolah, sebagian besar dari mereka sengaja “tidak meluluskan dirinya” baik dalam tes tertulis maupun tes wawancara. Kesemuanya itu dilakukan demi semata-mata tidak diangkat menjadi kepala sekolah.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan tidak hanya *re-grouping* sekolah dasar, tetapi juga permasalahan tata kelola SDM. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sragen sudah menyiapkan langkah antisipasinya, yaitu (1) menyediakan alokasi dana tambahan, baik dari APBD maupun CSR Perusahaan untuk mendukung implementasi kurikulum muatan lokal; dan (2) jika diperlukan SDM tambahan atau baru, maka biaya gaji, tunjangan, honorarium, dan sebagainya akan ditanggung dari alokasi anggaran yang telah disiapkan; (3) jika diperlukan Pembangunan sentra atau laboratorium, maka dana pembangunan tersebut juga akan diambilkan bukan dari dana rutin Dinas Pendidikan (APBN & APBD), melainkan dari Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBD dan Dana CSR Perusahaan (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022).

3. Kepala Sekolah dan Guru

Kepala sekolah dan guru merupakan elemen terpenting dalam implementasi kurikulum muatan lokal (Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, 2022). Kepala sekolah ini akan berperan sebagai dirijen yang memimpin sebuah orkestasi perubahan yang dilakukan pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar. Sementara guru merupakan musisi yang memainkan berbagai alat musik secara bersamaan, terarah, harmonis, dan ritmis. Dengan demikian, kombinasi yang dihasilkan akan memberikan

nuansa baru yang indah dan merdu bagi dunia pendidikan di Bumi Sukowati (Wirajaya, 2022).

Ada tiga muatan penting dalam kurikulum muatan lokal yang perlu dipahami oleh seluruh stakeholder pendidikan di Kabupaten Sragen, yaitu (1) akhlak atau adab; (2) kompetensi; dan (3) literasi. Terkait dengan “akhlak” atau “adab” ini, ada beberapa ahli pendidikan yang mengistilahkannya “karakter” atau “moral”.

Apabila dirunut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “akhlak” secara **Etimologi:** berasal dari bahasa Arab [*Arab* أَخْلَاقٌ *akhlāq n pl f* 'karakter']; *n* budi pekerti; kelakuan (Tim, 2020). Adapun kata “adab” secara **Etimologi:** [*Arab* أَدَبٌ *adab n sg m* 'ucapan dan perbuatan terpuji']; *n* kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak (Tim, 2020). Selanjutnya, kata “karakter” berarti *n* sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak (Tim, 2020). Kemudian, kata “moral” berarti: (1) *n* (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila: -- mereka sudah bejat, mereka hanya minum-minum dan mabuk-mabuk, bermain judi, dan bermain perempuan; (2) *n* kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan: tentara kita memiliki -- dan daya tempur yang tinggi; (3) *n* ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita (Tim, 2020). Dengan demikian, akhlak atau adab merupakan esensi terpenting dari pengembangan kurikulum muatan lokal.

Saat ini, orang pintar agama Islam semakin banyak. Pondok pesantren, *boarding school*, atau madrasah jumlahnya meningkat tajam. Ustad-ustad muda, kyai-kyai muda, ulama-ulama muda, baik selebritis maupun yang bukan, berkecambah di mana-mana. Kini, Islam tampil sebagai gaya hidup. Berita-berita tentang festival keislaman, audisi tahfiz, audisi dai cilik, *short course* ilmu-ilmu dasar Islam, kursus baca kitab, dan perayaan serta pertunjukan agama lainnya yang dimodifikasi sedemikian modern bersilang sengkabut dengan berita-berita tentang korupsi, ayah menghamili anaknya, ibu bertindak asusila dengan putranya, kakak berduel dengan adiknya gara-gara warisan, ledakan bom di gereja, pembubaran paksa pengajian, penipuan, perampokan, dan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya yang massif dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Allah Swt. sebagai Tuhannya dan Rasulullah saw sebagai nabinya (Al-Ghiffari, 2022).

Mengapa hal itu bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan karena umat Islam saat ini lebih mengedepankan ilmu daripada adab. Ia menganggap bahwa ilmu sebagai mercusuar peradaban dan dengan ilmu, orang dapat bertindak rasional. Ia tidak merasa bahwa di samping ilmu merupakan cahaya, juga dapat bertindak sebagai tabir yang membuat manusia terhalang dari cahaya (An-Nawawi, 2019; Nawawi, 2021, 2022; Az-Zarnuji, 2022a, 2022c, 2022b; Jama'ah, 2022).

Memang ilmu sangat penting, tetapi yang jauh lebih penting daripada ilmu adalah pengamalannya. Tiadalah berguna orang yang memiliki ilmu segudang apabila adabnya tidak lebih dari setitik debu. Bahkan dalam Islam, orang mukmin dikatakan sempurna imannya bukan karena ilmunya tinggi, melainkan karena akhlaknya bagus. Oleh karena itu, mendahulukan adab sebelum ilmu merupakan sesuatu yang penting dalam konteks sekarang dan masa depan. Sebab, adab adalah mutiara Islam. Tanpa adab, hilanglah ruh Islam. Umat Islam terbaik adalah orang-orang yang adabnya melampaui ilmunya (Al-Ghiffari, 2022). Terkait dengan “akhlak” atau “karakter” ini terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu (1) moral: jujur, disiplin, berintegritas, dan sebagainya; dan (2) kinerja: kerja keras, kerja tuntas, kerja sama tim, dan sebagainya. Selanjutnya, adalah persoalan kompetensi yang meliputi: (1) kritis; (2) kreatif; (3) komunikatif; dan (4) kolaboratif. Tahapan akhir adalah literasi. Literasi di sini bukan semata-mata berfokus pada kemampuan membaca dan berhitung, melainkan lebih pada aspek keterbukaan wawasan (Wirajaya, 2022). Dengan demikian, pengembangan materi kurikulum muatan lokal

dengan mempertimbangkan aspek akhlak, kompetensi, dan literasi akan dapat menyiapkan pembentukan generasi emas Indonesia pada tahun 2045.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan yang dapat dilakukan adalah *pertama*, kepala daerah atau Bupati menyiapkan seperangkat aturan berbentuk Perda (Peraturan daerah) untuk mendasari implementasi pengembangan kurikulum muatan lokal yang berkarakter Pancasila. *Kedua*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan pengembangan dokumen kurikulum muatan lokal dengan melibatkan semua stakeholder terkait. *Ketiga*, kepala sekolah dan guru merupakan eksekutor di lapangan yang nantinya akan mengimplementasikan kurikulum tersebut. *Keempat*, pendanaan implementasi kurikulum ini dibebankan melalui alokasi khusus APBD dan Dana CSR Perusahaan. *Kelima*, pengimplementasian kurikulum tersebut harus memperhatikan: (1) akhlak; (2) kompetensi; dan (3) literasi.

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan adalah hal-hal positif dan sinergis semacam ini dapat juga diterapkan di daerah-daerah yang lain sehingga permasalahan dunia pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar dapat diatasi dengan baik. Selain itu, perlu pendekatan secara khusus kepada perusahaan swasta, BUMD, maupun BUMN untuk dapat berperanserta aktif dengan turut menyisihkan sebagian CSR mereka guna mendukung program-program keberlanjutan semacam ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan terhadap pelaksanaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sragen, khususnya lingkup pendidikan dasar. Selain itu, model pengembangan muatan lokal dapat juga dilakukan pada tingkatan berikutnya sehingga pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkompeten, serta berakhlak dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus (2014) *Manfaat Quantum Dzikir. Semua Muslim Harus Tahu!* Available at: <https://quantumbioenergi.com/manfaat-quantum-dzikir/> (Accessed: 30 March 2021).
- Agustian, A. G. (2003) *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual: ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Jakarta: Arga Wijaya Persada.
- Al-Ghiffari, N. M. (2022) *Dahulukan Adab Sebelum Ilmu: Raih Senjata Keutamaan Segala Hal dengan Akhlak Mulia*. Pertama. Edited by A. M. Ali. Magelang: Ranah BBuku.
- An-Nawawi, I. (2019) *At-Tibyan: Adab Membaca & Menghafal Al-Qur'an*. II. Edited by Y. Amri. Solo: Ummul Quira.
- Anonim (2014a) *Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013*. Indonesia. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://peraturan.go.id/id/permendikbud-no-79-tahun-2014&ved=2ahUKEwjYp7-2-M2GAxUjxzgGHRnsAJAQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw24MGZw7sSoAEb4BFsyykf0>
- Anonim (2014b) *Undang-Undang No 23 tahun 2014*. Indonesia. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://peraturan.bpk.go.id/Download/142102/PERDA%2520NO%25208%2520TH%25202019.pdf&ved=2ahUKEwj9vtSy882GAxXZ8DgGHf-FCIcQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw1LFiarsXkKR71lLofKuFHs>

- Anonim (2024) *Sragen dalam Angka 2024*. Sragen: BPS Sragen. Available at: <https://sragenkab.bps.go.id/statictable/2023/02/24/491/jumlah-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-dasar-sd-di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kecamatan-2021-2022-dan-2022-2023.html>.
- Az-Zarnuji, I. (2022a) *Adab Di Atas Ilmu 3: Jalan Keberkahan dalam Kegiatan Belajar Mengajar*. Edited by Rusdianto. Yogyakarta: DIVA Press.
- Az-Zarnuji, I. (2022b) *Ta'lim al-Muta'allim: Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia*. VI. Edited by T. Arofah. Solo: Arofah.
- Az-Zarnuji, I. (2022c) *Ta'limul Muta'allim: Pentingnya Adab Sebelum Ilmu*. XV. Edited by Y. Amri. Solo: Aqwam.
- Chopra, D. (2002) *Quantum Healing: Exploring the Frontiers of Mind/Body Medicine*. Bandung: Nuansa.
- Hayat (Universitas Islam Malang) (2013) 'Pendidikan Islam dalam Konsep Prophetic Intelligence', *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Herdiansyah, H. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. 3rd edn. Edited by R. Oktaviani. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hernowo (2009) *Mengikat Makna: Update Membaca dan Menulis yang Memberdayakan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Jama'ah, I. (2022) *Adab Fondasi Ilmu: Panduan Akhlak Lengkap untuk Santri dan Penuntut Ilmu*. III. Edited by M. I. Syarqi. Solo: Taujih Inspirasi Qurani.
- Kebudayaan, M. P. dan (2014) *Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013*.
- Khadijah, N. (2021) *Kritisi Hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP 57 2021, HNW: Harus Evaluasi dan Beri Sanksi - Pikiran-Rakyat.com*. Available at: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011789362/kritisi-hilangnya-pancasila-dan-bahasa-indonesia-dalam-pp-57-2021-hnw-harus-evaluasi-dan-beri-sanksi> (Accessed: 25 May 2021).
- Khalid, A. (2008) *Quantum Change [Quantum Perubahan]: Menyingkap Rahasia Kedahsyatan & Arti Kemuliaan Seorang Muslim*. Jakarta: Pustaka Nun.
- Kolis, N. and Ajhuri, K. F. (2019) 'SANGKAN PARANING DUMADI: Eksplorasi Sufistik Konsep Mengenal Diri dalam Pustaka Islam Jawa Prespektik Kunci Swarga Miftahul Djanati', *Dialogia*. doi: 10.21154/dialogia.v17i1.1653.
- Miles, M. and Huberman, A. M. (2007) *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2009) *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawawi, I. (2021) *Adab di Atas Ilmu: Tuntunan Belajar - Mengajar yang Barokah*. Edited by Nurr. Yogyakarta: DIVA Press.
- Nawawi, I. (2022) *Adab Di Atas Ilmu 2: Panduan Belajar Mengajar Al-Qur'an yang Barakah*. Edited by M. S. Musthafa. Yogyakarta: DIVA Press.
- Noviani, Leny, Tuhana, Asep Yudha Wirajaya, A. C. B. (2022) *Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Keunggulan dan Potensi Daerah: Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Sragen*. Edited by Andriyanto. Klaten: Lakheisha.
- Rahmat, M. (2010) "Proses Pendidikan Insan Kamil", *Alqalam IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (Terakreditasi Dikti)*.
- Ramadhan, A. (2021) *Komisi X Minta PP 57/2021 Direvisi karena Tak Wajibkan Pendidikan Pancasila*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/16/11351251/komisi-x-minta-pp-57-2021-direvisi-karena-tak-wajibkan-pendidikan-pancasila> (Accessed: 25 May 2021).
- Rohmadi, M. (2016) *Guru & Dosen Hebat dan Luar Biasa: Mentransformasi Diri Anda Menjadi Pendidik yang Berkarakter, Kreatif, Produktif, Inspiratif, Menyenangkan*,

- dan Sukses*. Kedua. Edited by R. Chandra. Surakarta: Pustaka Brilliant.
- Sabiila, S. I. (2021) *Kontroversi Pancasila Hilang dari SNP hingga Desakan Revisi PP 57/2021*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-5538021/kontroversi-pancasila-hilang-dari-snp-hingga-desakan-revisi-pp-572021> (Accessed: 25 May 2021).
- Sekjen Kemendikbud (2021) *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan» Republik Indonesia*. Available at: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/04/kemendikbud-ajukan-revisi-pp-nomor-57-tahun-2021> (Accessed: 25 May 2021).
- Sentanu, E. (2007) *Quantum Ikhlas: Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati*. Pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sihaloho, M. J. (2021) *Kontroversi PP 57/2021, PAN: Jangan Main-main untuk Soal Pancasila*. Available at: <https://www.beritasatu.com/nasional/761977/kontroversi-pp-572021-pan-jangan-main-main-untuk-soal-pancasila> (Accessed: 25 May 2021).
- Sugiyono (2016) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman (2010) *Bacalah! Menghidupkan Kembali Semngat Membaca Para Mahaguru Peradaban*. Pertama. Edited by I. Ashriyah. Bandung: MQS Publishing.
- Tim (2020) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud*. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Wirajaya, Yudha Asep, Sudardi, Bani, Istadiyantha, dan W. (2021) 'Language Diversity in Syair Nasihat: An Alternative Effort to Strengthen National Identity through Literature Learning', *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 10(2), pp. 314–325. doi: 10.26499/RNH.V10I2.4052.
- Wirajaya, A. Y. (2022) 'Implementasi Pendidikan Berkarakter Pancasila dalam Desain Kurikulum Muatan Lokal SD di Kabupaten Sragen: Sebuah Upaya Mempersiapkan Generasi Emas', *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 5(3), pp. 27–40. doi: 10.20961/SHES.V5I3.59308.
- Yudha Wirajaya, A. and Sudardi, B. (2021) 'Quantum Recitation Therapy in Syair Nasihat as an Alternative to Strengthen Mental and Spiritual Efforts During and Post-Pandemic Covid 19', *Javanologi: International Journal of Javanese Studies*, IV(2), pp. 101–114. Available at: <https://javanologi.uns.ac.id/vol-iv-2021/> (Accessed: 3 September 2021).